



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KAJIAN DAN INOVASI MANAJEMEN ASN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SUDRAJAT**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **404255**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **5.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 381 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 609 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **488.800.000**

1. MOBIL, VW NEW BEETLE VOLKSWAGEN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 209.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 31.800.000
5. LAINNYA, ALEX MOULTON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **239.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **599.015.248**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **6.676.815.248**



III. HUTANG

Rp.

5.810.530

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.671.004.718

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.